



Determinan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Industri Manufaktur

Dwi Astutik ^{1*}, Daniel Adi Setya Rahardjo ², Ivan Permana ³, dan Asri Winanti Madyoningrum ⁴

¹ Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Semarang, Jawa Tengah; e-mail : dwi_astutik@stekom.ac.id

² Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Semarang, Jawa Tengah; e-mail : daniel.asr@stekom.ac.id

³ Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Semarang, Jawa Tengah; e-mail : ivan@stekom.ac.id

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani, Bandar Lampung, Lampung; e-mail : asri.winanti@almadani.ac.id

* Corresponding Author : Dwi Astutik

Abstract: This study aims to examine the influence of corporate governance determinants, particularly the presence of an independent board of commissioners and an audit committee, on the level of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure. The study focuses on manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Using a quantitative approach, the study population included 228 companies, and through purposive sampling technique, 92 companies met the criteria during a three-year observation period, resulting in a total of 276 observational data. Data analysis was conducted using multiple linear regression with a least squares approach, preceded by classical assumption testing to ensure model validity. The results show that the presence of an independent board of commissioners and an audit committee significantly influences CSR disclosure. This finding indicates that both elements can serve as instruments for implementing Good Corporate Governance (GCG) principles, encouraging companies to be more transparent and responsible in communicating their social activities to stakeholders. The implications of these results emphasize the importance of strengthening governance structures in encouraging more optimal CSR practices, as well as contributing to academic literature and managerial practice in the fields of accounting and sustainability management.

Keywords: Independent Board of Commissioners, Audit Committee, CSR Disclosure

1. Pendahuluan

Pada dewasa ini, masyarakat banyak disuguhkan oleh pilihan instrumen investasi, diantaranya melalui saham. Sehubungan dengan hal ini, maka bagi perusahaan yang telah melakukan going concern, dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat supaya sahamnya diminati oleh banyak masyarakat. Tujuan perusahaan tentu saja tidak hanya sebatas bertahan, namun lebih dari itu adalah bekerja keras untuk tentang keberkelanjutan jangka panjang. Perusahaan harus bisa menyelaraskan antara kepentingan principal dengan agent, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam *agency theory* [1], melalui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) secara optimal [2]. Dampak positifnya yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan, dan kemampuan di dalam memenuhi hak investor meningkat dan mengeliminir kemungkinan terjadinya risiko [3].

Salah satu wujud nyata dari keberhasilan implementasi GCG yaitu perusahaan mampu memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat umum, dan lingkungan secara berkelanjutan [4]. Program dan realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. baik dari aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan [3]; [5]; [6]. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa setiap badan usaha Perseroan Terbatas (PT) wajib memperhatikan dalam menjalankan usaha, aspek sosial serta lingkungan. Untuk itu, diperuntukan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Received: February 1, 2025

Revised: February 5, 2025

Accepted: March 16, 2025

Published: March 31, 2025

Curr. Ver.: March 31, 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open
access publication under the
terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
(CC BY SA) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mana setiap PT wajib melaksanakan program TJSI secara terencana dengan baik, dan bersifat berkelanjutan.

Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dimana dalam operasionalnya berisiko mempunyai dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, mulai dari suara bising, limbah, polusi udara, muatan, dan sebagainya. Perusahaan di industri manufaktur dengan demikian menjadi hal yang sangat krusial bagi pihak manajemen untuk fokus pada implementasi program CSR secara berkelanjutan. Pada kenyataannya, meskipun secara yuridis telah diatur secara baik namun kenyataannya bagi perusahaan dalam implementasi program CSR banyak kendala yang dihadapi. Mengingat realisasi CSR ini membutuhkan biaya yang cukup besar maka sering kali dijumpai komitmen perusahaan rendah, tingkat pemahaman dari pihak manajemen maupun masyarakat yang masih kurang, sehingga pelaksanaan program kurang terarah. Masyarakat yang mempunyai kecenderungan konsumtif sehingga kurang tepat manfaat, perusahaan seringkali tidak melakukan pendampingan secara langsung di dalam implementasi, dan dirasa oleh masyarakat kurang merata [7].

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penting untuk mengkaji tentang determinan pengungkapan CSR. Agency theory dan legitimacy theory dalam implementasi GCG bahwa CSR terkait erat dengan dewan komisaris independen, serta komite audit, dimana dewan komisaris independen memiliki dampak positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. [7]; [8]; [9]; [10]. Selanjutnya, komite audit juga terbukti secara empiris dapat meningkatkan pengungkapan CSR secara signifikan [8]; [11]; [10]. Pengujian empiris terhadap determinan CSR ini masih sangat terbatas, para akademisi sebagian besar menempatkan CSR sebagai faktor yang bersifat independen. Maka dari itu, pada kajian ini menawarkan sebuah temuan baru untuk menguatkan temuan sebelumnya yang masih sangat terbatas.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dinyatakan dengan bagaimanakah pengaruh dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR ?. Selanjutnya, dengan demikian tujuan secara spesifik dari penelitian ini yaitu menguji pengaruh dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR pada industri manufaktur. Manfaat yang ditawarkan dari kajian ini tentu saja, investor menjadi mengetahui karakteristik tata kelola perusahaan melalui peran dari dewan komisaris independen dan komite audit, yang kemudian dampaknya pada kemampuan perusahaan untuk merealisasikan program-program CSR yang telah dicanangkan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Agency Theory

Pada bisnis modern ini, menyebabkan adanya pemisahan antara manajemen dan pengelolaan perusahaan dengan kepemilikan. Agency theory memberikan peran penting sehubungan dengan hal tersebut, sekaligus sehubungan dengan implementasi GCG, karena merupakan teori yang membangun pola pikir dalam tata kelola perusahaan. Hal ini dipisahkan antara hak dan kewajiban antara agent dengan principal [1]. Selanjutnya, di dalam perusahaan ditunjukkan dalam pencegahan kemungkinan terjadinya suatu *asymetry information* [12]; [13]. Tujuan lebih lanjut, informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan kondisi senyatanya di dalam perusahaan, sehingga dapat memuaskan shareholders maupun stakeholders (Astutik dkk., 2022). Pada akhirnya, menurut agency theory ini juga berkorelasi kuat dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan [12]. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan GSG secara optimal, misal optimalisasi kinerja dari dewan komisaris independen, dan komite audit (Almashhadani & Almashhadani, 2022; Khairunnisa et al., 2022). Disisi lain, kondisi eksisting sering kali terjadi konflik kepentingan, misal tindakan oportunistik dari agen, selanjutnya menyebabkan moral hazard [14].

2.2 Legitimacy Theory

Legitimacy theory merupakan teori yang mengungkapkan bahwa perusahaan akan selalu berupaya untuk memperoleh, dan mempertahankan diri supaya tetap bisa diterima oleh masyarakat. Dinyatakan pula bahwa perusahaan harus melakukan operasi yang sejalan dengan berbagai norma sosial, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, supaya keberlangsungan usaha terjaga dengan baik [15]. Legitimacy theory ini menggambarkan tentang perbedaan

antara nilai/norma yang berlaku di masyarakat dengan perusahaan, yang kemudian menimbulkan adanya legitimacy gap [16]. Teori ini sekaligus merupakan sistem tata kelola perusahaan yang mempunyai orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah maupun individu. Artinya, dengan kata lain teori ini menekankan bahwa seluruh aktivitas perusahaan harus memperhatikan norma yang berlaku supaya dapat diterima oleh para stakeholders [5]. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan menjalankan program sosial yaitu melalui realisasi program CSR. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun hubungan timbal balik saling menguntungkan bagi perusahaan dengan seluruh masyarakat umum [9]. Artinya bahwa perusahaan dalam operasinya harus memastikan bahwa praktik bisnis secara etis dan legitimasi untuk kelangsungan bisnis berkelanjutan, yang salah satunya dengan menjalankan kewajiban sosialnya melalui kegiatan CSR [17].

2.3 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas kinerja perusahaan. Anggota-anggotanya berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai saham, baik secara langsung maupun tidak langsung [18]. Menurut prinsip GCG merekomendasikan bagi perseroan terbatas di dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan harus didukung jumlah dewan komisaris independen yang seimbang dengan keseluruhan saham yang beredar [9]; [5]. Hal ini tentu saja dimaksudkan supaya seluruh aktivitas dari pengawasan terlaksana dengan efektif sejalan peraturan perundang-undangan, sehingga kinerja perusahaan menjadi konsisten bahkan meningkat [18]. Terlebih di dalam mencegah terjadinya kemungkinan penipuan laporan keuangan [19]. Pengawasan tersebut menjadikan laporan keuangan akuntabel sehingga kinerja saham meningkat, dan menjaga berbagai hak stakeholders [20]; [3]. Selain itu juga memberikan berbagai nasihat kepada jajaran direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Tindakan yang dilakukan menganut prinsip independensi, dan memberikan kepastian dari setiap keputusan dilakukan secara adil, transparan, dan menjaga keseluruhan prinsip GCG [21].

2.4 Komite Audit

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga tanggung jawab komite ini adalah kepada pihak yang telah membentuknya, dan dalam membantunya, komite audit melaksanakan tugas-tugas pengawasan (terutama dalam pengawasan yang berhubungan dengan keuangan), audit, dan pengendalian internal [22]. Komite audit diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit setidaknya terdiri dari 3 (tiga) anggota yang mempunyai kompetensi mengenai manajemen keuangan dan hukum (Mardessi, 2021), dengan tanggung jawab melakukan pengawasan atas kinerja para auditor eksternal, dan internal terhadap berbagai tahap laporan keuangan [23]; [19]. Selanjutnya juga bertanggung jawab di dalam memberikan kepastian terhadap kepatuhan mengenai berbagai prinsip akuntansi [24]; [25]. Pengawasan dan pengendalian yang memadai, akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan, pada akhirnya kepercayaan stakeholders akan semakin meningkat [24]; [19].

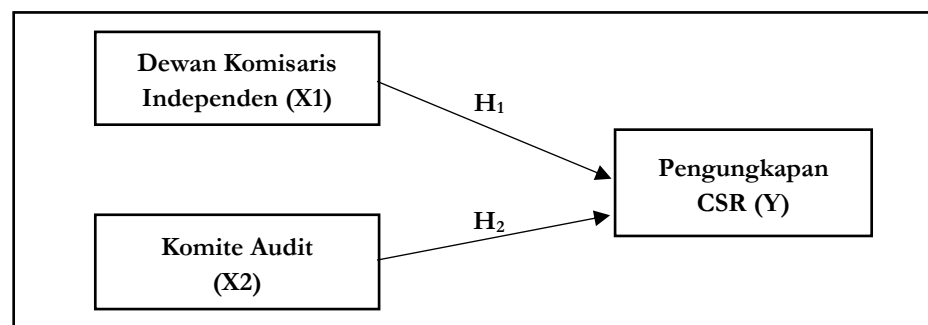
2.5 Pengungkapan CSR

CSR merupakan sebuah konsep bahwa perusahaan harus secara aktif dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas [9]; [3]. Sekaligus sebagai sebuah komitmen perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap efek dari operasi baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan [4], dan juga manfaat bagi masyarakat [5]. Pengungkapan CSR sekaligus sebagai alat untuk bertahan hidup dan sebagai pertimbangan investor dalam menanamkan sahamnya [9]; [26]. Memastikan pula kepada publik bahwa perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya telah dilakukan secara etis yaitu dengan memperhatikan dampak operasi pada masyarakat [27]; [6]. Tuntutan perusahaan terhadap pengungkapan CSR dikarenakan bahwa secara sosial perusahaan mempunyai kewajiban sosial masyarakat [9]. Banyak cara yang bisa dilakukan, misal melalui laporan tahunan, iklan, laporan keberlanjutan, serikat pekerja, pendidikan sekolah dan sebagainya [10].

2.6 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Agency theory dan *legitimacy theory* memberikan penjelasan bahwa dewan komisaris independen dimaksudkan untuk memastikan bahwa direktur telah menjalankan tugasnya

sesuai dengan regulasi, diantaranya yaitu mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui realisasi CSR [28], dan dibuktikan dalam pengujian Herman & Abbas [9]. Kedua teori tersebut juga mengungkapkan bahwa peran dari komite audit juga mampu meningkatkan realisasi program CSR, dan diungkapkan melalui laporan tanggung jawab sosial yang penuh tanggung jawab, handal dan lengkap. Herman & Abbas [9]; Rawi & Muchlish [10] telah membuktikan dan memberikan dukungan pada teori di atas. Gambar 1, dapat dirumuskan ke dalam kerangka konseptual yang dapat memberikan gambaran pengujian hipotesis atas keberadaan dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan hipotesis berikut :

H₁ : dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

H₂ : komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Upaya untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini, maka penelitian dikembangkan dengan menggunakan pendekatan model empiris kuantitatif asosiatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dikembangkan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tercatat sebagai industri manufaktur, yaitu sebanyak 228 perusahaan (sektor barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non primer, kesehatan, teknologi), dengan periode penelitian tahun 2022-2024). Pengujian dilakukan berdasarkan data sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel

Kriteria	Jumlah
Populasi.	228
Perusahaan yang <i>dellisting</i> selama periode yang diteliti.	(18)
Perusahaan dengan rasio pengungkapan CSR <60% secara berturut turut.	(41)
Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR secara lengkap.	(32)
Perusahaan yang pernah membukukan kerugian selama periode penelitian.	(21)
Data penelitian tidak lengkap.	(24)
Total Perusahaan yang Memenuhi Kriteria	92
Total Periode	3
Total Sampel (Data)	276

3.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini masing-masing diproksikan dengan formulasi pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Operasionalisasi Variabel
Dewan komisaris independen (X_1)	$DKI = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100$
Komite audit (X_2)	$Ln_KA = \sum \text{Komite audit yang dimiliki perusahaan.}$
Pengungkapan CSR (Y)	$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$ $\sum X_{ij} = \text{CSR yang diungkap skor 1, jika tidak diungkap skor 0}$ $X_j = \text{jumlah indikator (77)}$ $CSRDI = \text{rasio pengungkapan CSR}$

3.4 Alat Analisis

Sejalan dengan permasalahan penelitian, maka alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan menetapkan persamaan model berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots(I)$$

Selanjutnya, berdasarkan persamaan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan berbagai tahapan uji asumsi klasik, yang kemudian dilanjutkan dengan uji model dan uji hipotesis untuk menjawab rumusan hipotesis yang telah diajukan berdasarkan berbagai teori yang telah diajukan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut gambaran data mengenai dewan komisaris independen, komite audit dan kemampuan industri manufaktur dalam mengungkapkan CSR selama periode 2022-2024:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Dewan Komisaris Independen (X_1)	26.07	71.77	47.35	15.43
Komite Audit (X_2)	2	6	3.05	.51
Pengungkapan CSR (Y)	41.07	82.91	69.25	6.05
<i>Valid N (listwise)</i>	276			

Sumber : data sekunder diolah (2025).

Berdasarkan Tabel 3 nampak bahwa proporsi dewan komisaris independen terendah sebesar 26.07% dibanding keseluruhan jumlah jajaran dewan komisaris yang ada di perusahaan. Artinya, kelompok perusahaan ini belum memenuhi standar minimum POJK No. 33 /POJK.04/2014, yang mana bagi para perusahaan yang go public, apabila mempunyai jumlah dewan komisaris lebih dari 2 (dua) orang, maka setidaknya 30% diantaranya harus menduduki posisi dewan komisaris independen. Disisi lain, banyak perusahaan yang sudah memenuhi standar tersebut, yaitu jumlah maksimum 71.77%. Data juga menunjukkan bahwa di industri manufaktur selama periode penelitian secara rata-rata (47.35%) juga telah memenuhi regulasi.

Jumlah komite audit yang dimiliki oleh salah satu perusahaan sebanyak 2 (dua) orang, terbanyak adalah 6 (enam) orang dan rata-rata 3 (tiga) orang. Kondisi ini dengan demikian nampak bahwa pada industri manufaktur juga telah memenuhi POJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Regulasi tersebut menyatakan bahwa jumlah komite audit bagi perusahaan yang telah go public minimal mempunyai 3 (tiga) orang dewan komisaris independen atau berasal dari luar perusahaan, untuk menjaga independensi yang tinggi.

Nampak pula di industri manufaktur bahwa kemampuan perusahaan melakukan pengungkapan CSR terendah sebesar 41.07%, tertinggi 82.91% dan rata-rata 69.25%. Artinya bahwa, perusahaan-perusahaan yang sedang diteliti ini telah menjalankan PP RI No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dengan baik. Mengingat dalam regulasi tersebut bahwa setiap perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satunya untuk memenuhi regulasi tersebut yaitu dengan mencanangkan, dan merealisasikan program CSR, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum. Pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan citra positif bagi perusahaan.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Tahap awal sebelum melakukan pengujian model ini maka dilakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas, sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

Uji	Cut Off	Hasil	Kesimpulan
Normalitas Res3.	$Z_{Skewness} < 2,0$	1.453	Normal.
Heteroskedastisitas:			
$X_1 \rightarrow Y$.	$AbsRes3 > 0,05$	0.529	Tidak terjadi heteroskedastisitas.
$Ln_X_2 \rightarrow Y$.		0.344	
Autokorelasi	$Du < Dw < 4-Du$	$1.809 < 2.281 < 2.191$	Tidak terjadi autokorelasi.
Multikolinieritas:			
$X_1 \rightarrow Y$.	$VIF < 10$	1.726	Tidak terjadi multikolinieritas.
$Ln_X_2 \rightarrow Y$.		2.438	

Sumber : data sekunder diolah (2025).

Berdasarkan Tabel 4 nampak bahwa uji normalitas dilakukan pada Res3, yang artinya pengujian ini dilakukan 3 (tiga) tahap, yang mana tahap 1 (satu) terdapat 29 data outlier, tahap 2 (dua) sebanyak 18 data outlier dan tahap 3 (tiga) 14 data outlier. Artinya, dari 276 data sebagai sampel, dikurangi 61 tota data yang outlier. Uji normalitas dengan demikian dilakukan terhadap 251 data sebagai sampel untuk pengujian selanjutnya, nampak bahwa $Z_{Skewness} < 2,0$ ($1.453 < 2,0$) dengan demikian residual data dinyatakan normal. Model ini juga nampak terbebas dari masalah heteroskedastisitas, dibuktikan dengan hasil seluruh variabel independen mempunyai koefisien $AbsRes3 > 0,05$. Nampak pula tidak terjadi autokorelasi, karena koefisien $Du < Dw < 4-Du$ ($1.809 < 2.281 < 2.191$). Terbebas pula dari masalah multikolinieritas, yang mana secara statistik terbukti seluruh $VIF < 10$.

4.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data Tabel 5 nampak bahwa diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9.839 > 3.032$) dengan signifikansi 0.000. Artinya dengan demikian bahwa variabel dewan komisaris independen dan komite audit mempunyai kemampuan yang nyata dalam menjelaskan pengungkapan CSR. Besarnya kemampuan tersebut sebesar 30,2% (yang ditunjukan dengan koefisien adjusted R^2 sebesar 0,302), dengan demikian 60,8% ditentukan oleh faktor lain, sehingga perlu dikembangkan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 5. Uji Model dan Uji Hipotesis

Uji	Variabel		α	β	t	Kesimpulan
	Independen	Dependen				
H ₁	Dewan komisaris independen (X ₁).	Pengungkapan CSR (Y).	0.371	0.482	3.568 (0.000)	Diterima.
H ₂	Ln_Komite audit (X ₂).			0.205	2.014 (0.000)	Diterima.
Uji F				9.839 (0.000)		

Uji	Variabel		α	β	t	Kesimpulan
	Independen	Dependen				
	Adj. R ²				0.302	
	t tabel _{n=252; k=3; $\alpha=5\%$}	= 1.970				
	F tabel _{n=252; k=3; $\alpha=5\%$}	= 3.032				

Pada Tabel 5 terbukti pula bahwa hipotesis yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, dalam pengujian ini terbukti diterima ($3.568 > 1.970$ signifikansi 0.000). Artinya bahwa, kemampuan dewan komisaris independen dalam menjalankan tugas dengan optimal, maka perusahaan mempunyai kepatuhan yang besar untuk memenuhi kewajiban sosialnya salah satunya pengungkapan CSR meningkat. Hasil yang sama juga mengenai hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan ($2.014 > 1.970$ signifikansi 0.000). Terbukti pula bahwa kinerja komite audit yang tinggi, pada akhirnya auditor dalam menjalankan tugas dilakukan dengan optimal, sehingga kinerja keuangan meningkat. Selanjutnya, perusahaan mempunyai potensi besar untuk meningkatkan keuntungan, yang bisa diimplikasikan pada alokasi kewajiban sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan CSR mengalami peningkatan. Hasil pengujian ini sekaligus menunjukkan bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh yang lebih dominan dalam menunjang kemampuan perusahaan untuk merealisasikan CSR di berbagai bidang.

4.4 Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan CSR

Dampak dewan komisaris independen pada pengungkapan CSR memberikan dukungan kuat terhadap *agency theory*. Argumennya, menurut *agency theory* bahwa keberadaan dari dewan komisaris independen dimaksudkan untuk meningkatkan praktik GCG [28], dan meningkatkan kepatuhan berbagai regulasi terkait (Rodriguez et al., 2015). Pengujian Herman & Abbas [9] pada sektor barang konsumen; Tiarsa et al. [29] pada industri teknologi juga mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen memberikan dampak pengungkapan CSR semakin meningkat. *Agency theory* juga mengungkapkan dengan demikian implementasi GCG dengan optimal maka menjadi suatu faktor yang sangat penting, karena bisa mengurangi kekhawatiran *shareholders* sehubungan dengan *agency conflict* [30]. Kinerja dari dewan komisaris independen yang optimal, maka akan terkendali tentang transparansi, hingga independensi [2]. Pada akhirnya, sebagaimana dinyatakan dalam *legitimacy theory* keberadaan dewan komisaris independen mendorong perusahaan akan taat terhadap berbagai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku [14]. Salah satunya yaitu, bagi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada publik, maka wajib menjalankan kewajiban sosialnya baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan melalui peningkatan realisasi program CSR [3].

Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR

Temuan ini mengungkapkan bahwa komite audit memberikan dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan CSR, mendapat dukungan dari Rawi & Muchlish [10]; Herman & Abbas [10]. Argumennya bahwa, menurut *agency theory* keberadaan komite audit merupakan implikasi sebuah upaya dalam meningkatkan GCG, karena menjaga transparansi, dan akuntabilitas atas laporan keuangan, sekaligus kemungkinan terjadinya *fraud* terkait (Rodriguez et al., 2015). Lebih lanjut, *legitimacy theory* juga mengungkapkan bahwa komite audit mempunyai kontribusi besar dalam menjaga keberlanjutan perusahaan [26]. Hal ini secara nyata dilakukan melalui pengungkapan realisasi program CSR secara konsisten dan berkelanjutan [16]. Hal ini dikarenakan bahwa komite audit juga mempunyai peran melakukan pengawasan perihal realisasi CSR dan memastikan telah dilaksanakan secara transparan, akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam GCG [14]. Tambunan & Rosharlianti [19]; Tiarsa et al. [29] pada industri teknologi mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit dengan kinerja yang optimal bermanfaat untuk meningkatkan citra perusahaan dengan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat melalui realisasi program CSR. *Legitimacy theory* juga menyatakan yang mana tindakan tersebut sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya *legitimacy gap*, yang mana terjadinya perbedaan antara kepentingan perusahaan dengan para masyarakat [5].

5. Kesimpulan dan Saran

Pengujian ini memberikan dukungan pada *Agency Theory* dan *Legitimacy Theory*. Temuan diungkap bahwa terbukti secara nyata bahwa keberadaan dewan komisaris independen dan peran dari komite audit secara langsung dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dengan baik. Pada akhirnya, berdampak positif terhadap peningkatan akan realisasi program-program CSR yang telah dicanangkan oleh para agent. Dewan komisaris pada industri manufaktur, nampak lebih mendominasi perannya dalam memenuhi kepatuhan perusahaan akan regulasi yang menyangkut kewajiban sosialnya, yaitu pengungkapan CSR. Mengingat dampak dari dewan komisaris independen dan komite audit yang hanya 30.2% terhadap kemampuan perusahaan mengungkap CSR, maka bagi para praktisi bisa lebih terfokus pada kajian yang bersifat finansial. Bagi para peneliti selanjutnya, dengan demikian menambah faktor finansial, seperti perpajakan, profitabilitas, struktur modal, struktur asset dan ukuran perusahaan sebaiknya juga harus dipilah yang satu level, supaya tidak bias dalam pengaruh tersebut.

Referensi

- [1] D. F. S. Shubita, "The impact of ownership structure and investment decisions on capital structure: an empirical study from Jordan," University of Bedfordshire, 2023. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/10547/625946>
- [2] H. Abdullah and T. Tursoy, "The Effect of Corporate Governance on Financial Performance: Evidence From a Shareholder-Oriented System," *Iran. J. Manag. Stud.*, vol. 16, no. 1, pp. 79–95, 2023, doi: 10.22059/IJMS.2022.321510.674798.
- [3] E. Malik, M. N. Najamuddin, Mursalim, and L. Chalid, "The Effect of Good Corporate Governance, Profitability, and Corporate Social Responsibility on Market Reaction and Company Value in the Registered Mining Industry on the Indonesian Stock Exchange," *Int. J. Prof. Bus. Rev.*, vol. 8, no. 5, p. e02174, 2023, doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i5.2174.
- [4] K. Ardillah, R. Breliastiti, T. Setiawan, and N. M. Machdar, "The Role of Ownership Structure in Moderating The Relationship Between Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Firm Value," *Account. Anal. J.*, vol. 11, no. 1, pp. 21–30, 2022, doi: 10.15294/aaj.v11i1.58613.
- [5] V. S. Paramita and A. Ali, "Can Profitability Moderate the Impact of Green Investment, Corporate Social Responsibility, and Good Corporate Governance on Company Value on the SRI-KEHATI Index?," *Int. J. Financ. Res.*, vol. 4, no. 4, pp. 320–338, 2023, doi: 10.47747/ijfr.v4i4.1604.
- [6] T. Le Thanh, N. Q. Huan, T. T. Thuy Hong, and D. K. Tran, "The contribution of corporate social responsibility on SMEs performance in emerging country," *J. Clean. Prod.*, vol. 322, p. 129103, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.129103.
- [7] N. Jesika and W. Mawardi, "Pengaruh Manufaktur Hijau dan Corporate Social Responsibility Terhadap Performa Perusahaan Melalui Reputasi Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Jawa Tengah Yang Menrapkan Life Cycle Assessment)," 2025, *UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- [8] Y. Wati, T. Chandra, M. Irman, and S. Rahman, "Green Accounting, Corporate Governance, Sustainable Development: The Moderating Effect of Corporate Social Responsibility," *Indones. J. Account. Res.*, vol. 27, no. 02, pp. 213–242, 2024, doi: 10.33312/ijar.786.
- [9] S. Herman and D. S. Abbas, "The Influence of The Independent Board of Commissioners, Tax Avoidance And Institutional Ownership on Company Value Moderation by Corporate Social Responsibility," *Simp. Ilm. Akunt.*, vol. 9, no. 2, pp. 1164–1168, 2024.
- [10] R. Rawi and M. Muchlish, "Audit quality, audit committee, media exposure, and Corporate Social Responsibility," *J. Siasat Bisnis*, vol. 26, no. 1, pp. 85–96, 2022.
- [11] Afriatun Khasanah, Nur Isna Inayati, Iwan Fakhruddin, and Bima Cinintya Pratama, "Influence of Board Directors, Independent Commissioners, Audit Committee on CSR," *J. Akunt. Keuang. dan Bisnis*, vol. 16, no. 2, pp. 363–372, 2023, doi: 10.35143/jakb.v16i2.6194.
- [12] D. Astutik, G. Aditya, S. Y. Kusuma, and S. Sudarman, "Implementation of good corporate governance in improving company performance," *Account. Prof. J. Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 65–78, 2024, [Online]. Available: <https://www.ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/232>
- [13] Galuh Aditya, Hesti Ristanto, and Dwi Astutik, "Pengukuran Kinerja Saham Melalui Likuiditas Pada Saham JII 70," *J. Kendali Akunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 291–302, 2024, doi: 10.59581/jka-widyakarya.v2i2.3938.
- [14] S. D. M. Wardani, A. L. Wijaya, H. Paramitha Devi, and A. Ayera, "Effect of Capital Structure, Tax Avoidance, and Firm Size on Firm Value with Dividend Payout Ratio as Moderating," *J. Bus. Manag. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 069–081, 2022, doi: 10.47153/jbmr31.3022022.
- [15] A. A. Butt, A. Shahzad, and J. Ahmad, "Impact of CSR on Firm Value: The Moderating Role of Corporate Governance," *Indones. J. Sustain. Account. Manag.*, vol. 4, no. 2, p. 145, 2020, doi: 10.28992/ijsam.v4i2.257.
- [16] M. F. Owena, A. Hajanirina, and M. A. Reyes, "The impact of economic and social dimensions from CSR and firm size towards tax avoidance," *JAAF (Journal Appl. Account. Financ.)*, vol. 7, no. 1, p. 70, 2023, doi: 10.33021/jaaf.v7i1.4208.
- [17] T. Tiep Le and V. K. Nguyen, "The impact of corporate governance on firms' value in an emerging country: The mediating role of corporate social responsibility and organisational identification," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 9, no. 1, p. 2018907, 2022, doi: 10.1080/23311975.2021.2018907.

- [18] F. Nurjanah, "The Influence of Managerial Ownership and Characteristics of The Board of Commissioners on Company Performance," *J. Sci.*, vol. 11, no. 1, pp. 236–242, 2022, [Online]. Available: <http://infor.seaninstitute.org/index.php>
- [19] H. Tambunan and Z. Rosharlianti, "The Effect of The Audit Committee And The Independent Board Of Commissioners On Firm Value With Financial Performance As A Moderating Variable," *Marg. J. Manag. Account. Gen. Financ. Int. Econ. Issues*, vol. 2, no. 4, pp. 1016–1023, 2023.
- [20] E. Widayawati and R. N. Hardati, "The Effect of Good Corporate Governance on Company Value with Financial Performance as a Mediating Variable," *Int. J. Econ. Bus. Account. Res.*, vol. 7, no. 2, pp. 611–623, 2023.
- [21] S. Nisrina, I. W. Ningtyas, and A. Wiwaha, "Pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan manufaktur subsektor Food and Beverage," *Int. J. Digit. Entrep. Bus.*, vol. 3, no. 2, pp. 92–101, 2022, doi: 10.52238/ideb.v3i2.95.
- [22] Y. M. Suaidah, G. Chandrarin, and D. Zuhroh, "International Journal of Social Science Research and Review," 2023.
- [23] E. Ellyana, "The Effect of Ownership Managerials, Independent Commissioners And Audit Committees on Company Value (Banking Companies Listed On The Indonesia)," *Scientia*, vol. 2, no. 1, pp. 298–311, 2023, doi: 10.51773/sssh.v2i1.166.
- [24] R. Mas'Ud, H. Khotmi, Fachrozi, and M. Azizurrohman, "Determining Company Value with Good Corporate Governance as Moderating Variable in Jakarta Islamic Index," *Qual. - Access to Success*, vol. 24, no. 192, pp. 368–375, 2023, doi: 10.47750/QAS/24.192.44.
- [25] S. Octaviani, "The effect of audit committee, internal auditor and audit quality on firm value," *Int. J. Sci. Technol. Manag.*, vol. 4, no. 2, pp. 373–378, 2023.
- [26] D. Orbaningsih, "The Effect of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure on Company Value with Profitability as Moderating Variables," *J. Econ. Financ. Manag. Stud.*, vol. 05, no. 05, pp. 1309–1324, 2022, doi: 10.47191/jefms/v5-i5-12.
- [27] I. B. A. Purbawangsa, S. Solimun, A. A. R. Fernandes, and S. Mangesti Rahayu, "Corporate governance, corporate profitability toward corporate social responsibility disclosure and corporate value (comparative study in Indonesia, China and India stock exchange in 2013-2016)," *Soc. Responsib. J.*, vol. 16, no. 7, pp. 983–999, 2020, doi: 10.1108/SRJ-08-2017-0160.
- [28] R. O. Salawu, "Corporate Governance and Tax Planning Among Non-Financial Quoted Companies in Nigeria," *African Res. Rev.*, vol. 11, no. 3, p. 42, 2017, doi: 10.4314/afrrrev.v11i3.5.
- [29] D. S. Tiarsa and E. Subiyanto, "Implications of Good Corporate Governance and Tax Avoidance on Firm Value Through Corporate Social," *Am. J. Econ. ...*, vol. 4, no. 3, pp. 257–277, 2025, [Online]. Available: <http://ajemb.us/index.php/gp/article/view/196%0Ahttps://ajemb.us/index.php/gp/article/download/196/287>
- [30] O. Khongmalai and A. Distanont, "Corporate governance model in Thai state-owned enterprises: structural equation modelling approach," *Corp. Gov.*, vol. 17, no. 4, pp. 613–628, 2017, doi: 10.1108/CG-01-2016-0021.